



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SUB UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 486080

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/350 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 281.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR Tahun 2014, HADIAH Rp.
12.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
240.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HADIAH Rp. 22.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HADIAH Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 90.140.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 217.655.802**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 2.139.295.802**

III. HUTANG **Rp. ---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.139.295.802**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.